

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) adalah organisasi internasional yang saat ini terdapat 193 negara anggota. Tujuan utama dari PBB adalah untuk mendorong kerjasama internasional dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, budaya dan lingkungan. PBB atau United Nations dibentuk pada 24 Oktober 1945 pasca berakhirnya Perang Dunia II. Sebelum berdiri PBB, Liga Bangsa – Bangsa memiliki peran sebagai organisasi internasional dengan anggota negara – negara di seluruh dunia. Semenjak dimulainya Perang Dunia II, PBB kehilangan perannya dan tidak mampu menghentikan perang yang melibatkan negara – negara Eropa dan Asia Pasifik.

Dewan Keamanan PBB adalah satu dari enam organ yang ada dalam PBB. Bagian – bagian tersebut adalah Majelis Umum, Dewan Keamanan, Sekretariat, Mahkamah Internasional, Dewan Ekonomi dan Sosial, dan Lembaga Khusus. Fungsi utama Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) adalah menjaga keamanan dan kedamaian dunia. Dewan Keamanan PBB terdiri dari 15 anggota, 5 anggota tetap (Tiongkok, Perancis, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat) dan 10 anggota tidak tetap yang dipilih oleh anggota PBB yang masa jabatannya 2 tahun.<sup>1</sup> Setiap anggota memiliki satu suara. Di bawah Piagam PBB, semua negara anggota

---

<sup>1</sup> United Nations, Security Council, [www.un.org/en/sc/](http://www.un.org/en/sc/) diakses 12 Juni 2015

diwajibkan untuk mematuhi keputusan Dewan. Dewan Keamanan mengambil keputusan dalam menentukan keberadaan ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi.<sup>2</sup>

Berbagai konflik internasional dan ancaman terhadap masyarakat internasional mulai banyak bermunculan sehingga peran dari berbagai aktor internasional seperti negara, organisasi internasional maupun LSM internasional dibutuhkan untuk menghilangkan atau menghindari terjadinya konflik. PBB sebagai salah satu organisasi internasional memiliki beberapa peran penting sebagai mediator atau pengiriman pasukan perdamaian ke beberapa daerah yang terancam oleh konflik. Peran utama Dewan Keamanan PBB adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional yang dilakukan dengan dua cara. Pertama, penyelesaian secara damai sengketa – sengketa internasional yang dipandang mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Kedua, apabila cara pertama dianggap gagal atau tidak memadai adalah dengan tindakan pemaksaan.<sup>3</sup>

Anggota Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) merupakan wakil – wakil dari negara terpilih namun mereka harus bertindak atas nama DK-PBB bukan sebagai individu – individu yang memiliki kepentingan sendiri. Peran utama yang pertama yaitu penyelesaian sengketa secara damai dilakukan oleh DK-PBB dalam menyelesaikan konflik secara umum. Sengketa atau konflik itupun harus dipilih oleh anggota dewan melalui klasifikasi tertentu salah satunya adalah sengketa tersebut harus dalam skala internasional. Prosedur penyelesaian konflik juga

---

<sup>2</sup> United Nations, Main Organ <http://www.un.org/en/sections/about-un/mainorgans/index.html> diakses 5 Oktober 2015

<sup>3</sup>D.W Bowett Q.C, 1992, LL.D. *Hukum Organisasi Internasional*, Sinar Grafika:Jakarta Hal 42-49

berbeda ada yang melalui cara tradisional atayu menyerahkan pilihan kepada kedua belah pihak yang terlibat. Peran yang terlihat oleh DK-PBB adalah sebagai mediator antara India dan Pakistan pada sengketa Kashmir tahun 1947. DK-PBB mengirimkan perwakilan PBB ke India dan Pakistan untuk membicarakan solusi untuk kedua negara tersebut. Pengiriman ini dilakukan tiga kali yang diakhiri oleh resolusi oleh DK-PBB.<sup>4</sup>

Apabila cara tradisional tidak bisa dipakai, maka tindakan pemaksaan digunakan oleh DK-PBB untuk mengakhiri sebuah konflik. Tindakan pemaksaan melibatkan angkataan udara, laut dan darat. Penyelesaian konflik oleh DK-PBB juga melalui beberapa krisis terutama adanya konflik timur – barat (Uni Soviet dan Amerika Serikat) sehingga dewan menggunakan haknya untuk kepentingan sendiri. Krisis Kongo pada Juli 1960 merupakan contoh dari suatu situasi yang menuntut dilakukan tindakan PBB tetapi tidak melibatkan konflik Timur-Barat. Karena itu tiga resolusi penting berasal dari DK-PBB yang memungkinkan Sekretaris Jenderal memberikan bantuan militer kepada pemerintah Kongo. Sedangkan konflik yang melibatkan kepentingan Timur-Barat seperti Konflik Berlin, Palestina, Indochina dan Hungaria, Dewan tidak pernah menggunakan kekuasaan pemaksaan.<sup>5</sup>

Tidak semua konflik internasional titik akhir penyelesaiannya dilakukan oleh DK-PBB. Beberapa konflik internasional diserahkan DK-PBB kembali ke Majelis Umum PBB. DK-PBB mempunyai alternatif lain untuk penyelesaian konflik misalnya merekomendasikan prosedur atau metode yang layak untuk

---

<sup>4</sup>Ibid 3

<sup>5</sup>Ibid 3

penyelesaian konflik contohnya dengan menyerahkan sengketa hukum ke ICJ (*International Court of Justice*). Alternatif lain yang diberikan oleh DK-PBB membentuk kelompok '*on the spot*' seperti mandat yang diberikan kepada MONUSCO (*United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo*) dalam mengatasi perang sipil di Kongo.<sup>6</sup> Selain itu DK-PBB juga membentuk *Committee for Good Offices* di Indonesia pada tahun 1947 pasca agresi militer Belanda I.

Hubungan Pemerintah Uganda dan PBB sudah dimulai semenjak Uganda masuk menjadi anggota PBB. Uganda menjadi anggota PBB pada tahun 1963. Selama lima dekade PBB melalui berbagai lembaga, program, dana dan entitas telah bekerja dalam kemitraan dengan Pemerintah Uganda dan didukung Pemerintah Uganda untuk mencapai tujuan pembangunan. PBB telah memberikan dukungan teknis, peningkatan kapasitas dan bantuan untuk mengatasi berbagai perkembangan dan tantangan kemanusiaan di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan hak asasi manusia dan jenis kelamin.<sup>7</sup>

Uganda adalah negara yang terletak di benua Afrika merupakan salah satu dari banyak negara mengalami konflik sama seperti negara Afrika lainnya seperti Republik Demokratik Kongo, Sudan dan Sudan Selatan. Pemberontakan terjadi di Uganda sudah berlangsung sejak lama yaitu pada awal 1980-an tepatnya pada tahun 1986. Pada permulaannya gerakan ini disebut *Holy Spirit Movement* (HSM). HSM adalah kelompok pemberontak yang dipimpin Alice Auma. Dia

---

<sup>6</sup>MONUSCO, <http://monusco.unmissions.org/> diakses 5 Oktober 2015

<sup>7</sup>United Nations, Uganda, <http://www.un-ug.org/page/un-system-uganda> diakses 20 Oktober 2015

berganti nama menjadi Alice Lakwena dimana arti Lakwena adalah semangat orang Italia yang meninggal selama Perang Dunia Pertama.<sup>8</sup>

Dalam susunan organisasinya, HSM mengurus bagian politik dan *Holy Spirit Mobile Force* mengurus bagian militer, tapi tidak ada pemisahan yang nyata dari fungsi yang digunakan secara bergantian. Setelah mengumpulkan sekelompok kecil pengikut, Alice mengajak kelompok pemberontak lain, *Uganda People's Democratic Army* (UPDA) untuk menempatkan beberapa anggotanya dibawah kepemimpinannya pada November 1986. HSM berjuang layaknya tentara biasa yaitu mengendalikan dan mengambil wilayah serta bertempur dengan *National Resistance Army* (NRA). Pasukan HSM dikalahkan oleh pasukan Museveni pada tahun 1987, Lakwena melarikan diri ke Kenya. Banyak pengikutnya bergabung *Lord's Resistance Army* (LRA) di bawah Joseph Kony, yang mengaku sebagai sepupu Alice Lakwena.

Pada tahun 1988, Kelompok yang dipimpin Joseph Kony mulai berkembang setelah kekalahan Alice dan kelompok ini banyak mengadopsi pemikiran Alice ke kelompoknya. Joseph Kony bukan tokoh spiritual sebaliknya, perannya lebih sebagai tokoh politik yang menanamkan ideologi, sering dalam bentuk bentuk keyakinan / agama untuk memotivasi LRA. Pengaruh yang lebih langsung terhadap Kony dan LRA adalah UPDA, kelompok yang dipimpin mantan perwira Acholi dari tentara nasional Uganda sebelum Museveni berkuasa.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Jackson, Paul, 2010, *Politics, Religion and the Lord's Resistance Army in Northern Uganda*. Religions and Development Research Programme. Hal 11-12

<sup>9</sup>Ledio Cakaj, *The Lord's Resistance Army of Today*, Enough Project, November 2010, Hal 2

Kelompok ini berbasis di Uganda dengan tujuan yang sama seperti kelompok terdahulu yaitu untuk menggulingkan pemerintah Uganda. Setelah kekalahan UPDA dan HSM, mayoritas orang di Uganda utara yang ragu-ragu untuk terlibat dalam konflik lebih lanjut. Joseph Kony yang memulai gerakannya pada akhir tahun 1987 menemukan kesulitan menarik pengikutnya pada tahun 1988. Dia kemudian beralih kepraktek banyak digunakan oleh Museveni pada kelompoknya, NRA yaitu melalui perekrutan anak-anak. Belajar dari ayah Alice Auma, Severino Lukoya yang menculik anak-anak dari Utara untuk melanjutkan pemberontakan putrinya, Joseph Kony menggunakan strategi LRA yang masih digunakan hari ini: menculik pria dan wanita muda dan memaksa mereka untuk memperjuangkan LRA.<sup>10</sup> Tindakan lainnya yang terjadi dalam masa pemberontakan LRA adalah tindakan pemerkosaan, penyiksaan dan pembunuhan yang dilakukan kurang lebih lima belas tahun di Uganda Utara. Sebagian besar anggota LRA adalah anak – anak (sekitar 80%) yang diculik dan ‘diolah’ untuk menjadi prajurit. Anggota LRA juga menculik anak-anak, khususnya anak perempuan, untuk melayani sebagai budak seks; beberapa bahkan telah diberikan sebagai "hadiah" untuk pedagang senjata di Sudan.

LRA semakin meluas dengan berbagai sekutu di sekitar Afrika bagian Tengah. Pada tahun 1994, Joseph Kony menemukan sponsor baru di Pemerintah Sudan dimana Sudan juga mempunyai konflik tersendiri dalam Pemerintah Sudan yang akhirnya menjadi kunci utama konflik batas regional.<sup>11</sup> Pada tahun 2005, pemerintah baru Sudan Selatan dimana dulu mereka memberikan pertahanan

---

<sup>10</sup>Ibid 8 Hal 3

<sup>11</sup>Ibid 8 Hal 3

terhadap masuknya anggota LRA. Pemerintah Sudan Selatan yang sebagian besar adalah anggota SPLM (*Sudan People's Liberation Movement*) mengubah pandangan mereka terhadap LRA.<sup>12</sup> Melalui aliansi dengan berbagai kelompok di Sudan dan sekitarnya meningkatkan jumlah pasukan LRA pada pertengahan 1990-an yang berhasil mengajak ratusan orang bergabung dengan LRA. Selain itu kegiatan LRA semakin aktif di berbagai negara seperti Sudan Selatan, Kenya dan Republik Afrika Tengah.<sup>13</sup>

LRA telah bertahan selama kurang lebih 25 tahun dan sudah berhasil memberikan teror kepada rakyat Uganda dan negara di sekitar Afrika Bagian Tengah. Kepentingan LRA diketahui memiliki kepentingan yang dinamis dan berubah seiring waktu membuat banyak pihak payah untuk melakukan negosiasi. Dalam kurun waktu 25 tahun kepemimpinan Joseph Kony, LRA telah menewaskan kurang lebih 100.000 orang sehingga hal ini sudah menjadi masalah internasional yang perlu diatasi.<sup>14</sup> Pemberontakan LRA yang sudah dianggap sebagai masalah internasional membuat berbagai pihak internasional berbondong untuk melakukan negosiasi dengan pemimpin LRA. Internasionalisasi konflik yang terjadi bermula saat LRA dan pemerintahan Uganda sama – sama menegosiasikan sebuah perjanjian perdamaian di tahun 2008. *Juba Talks* mengalami jalan buntu karena itu merupakan jalan dari kelompok LRA untuk lari ke perbatasan Sudan Selatan, Kongo dan Republik Afrika Tengah. Dari sana

---

<sup>12</sup>Schomerus, Mareike, 2007, *The Lord's Resistance Army in Sudan: A History and Overview*. Geneva: Small Arms Survey Hal 28

<sup>13</sup>International Working Group on the LRA, 2011, *Diagnostic Study of the Lord's Resistance Army*, The International Bank for Construction and Development: World Bank

<sup>14</sup>News Vision, LRA Has Killed over 100.000, <http://www.newvision.co.ug/news/642967-lra-has-killed-over-100-000-un.html> diakses 27 Oktober 2015

mulailah kelompok LRA memberikan ancaman nyata kepada masyarakat di negara tersebut.<sup>15</sup>

Pada Maret 2002 setelah menerima izin dari pemerintah Sudan, pasukan Uganda menggelar operasi militer dengan kode sandi "Operasi Tinju Besi" (*Operation Iron Fist*). Kegagalan Uganda dalam mengatasi konflik lantas membuat kinerja pasukan negara tersebut dipertanyakan oleh dunia internasional. Isu korupsi & penyalahgunaan anggaran kemiliteran pun merebak karena walaupun anggaran militer Uganda terbilang tinggi.

Memasuki tahun 2005, sebagian pasukan LRA bergerak memasuki Republik Demokratik Kongo (RDK) yang letaknya memang berbatasan langsung dengan wilayah barat Uganda.<sup>16</sup> Kebijakan dari berbagai aktor internasional dilakukan untuk mengatasi pemberontakan LRA. Kebijakan yang dilakukan oleh aktor internasional salah satunya adalah Uni Afrika sebagai organisasi yang menaungi negara di Afrika. Mereka mengirimkan pasukan sebagai misi perdamaian dengan kelompok LRA. Uni Afrika mengirimkan 5.000 pasukan menuju perbatasan – perbatasan yang terkena dampak LRA untuk mengamankan situasi sekaligus untuk menangkap pemimpin utama LRA yaitu Joseph Kony.<sup>17</sup> Selain itu komitmen negara yang terkena dampak dari pemberontakan LRA ( Uganda, Sudan Selatan, Republik Afrika Tengah dan Republik Demokratik Kongo)

---

<sup>15</sup>Adam Branch, *Displacing Human Rights; War and Intervention in Northern Uganda*, Oxford University Press, New York, 2011, hal-30

<sup>16</sup>Re-tawon, Lord's Resistance Army, <http://www.re-tawon.com/2012/01/lords-resistance-army-ira-kelompok.html> diakses 14 Juni 2015

<sup>17</sup> Politik Indonesia, Uni Afrika Kerahkan 5.000 Prajurit Buru Pemimpin LRA, <http://www.politikindonesia.com/index.php?k=politik&i=32537-Uni-Afrika-Kerahkan-5.000-Prajurit-Buru-Pemimpin-LRA> diakses 12 Juni 2015

tidak memiliki tindakan yang efektif dan signifikan sehingga tidak memberikan hasil yang maksimal malah memberikan banyak peluang untuk Joseph Kony menambah anggota baru untuk masuk dalam kelompoknya. Negara yang terlibat dalam keanggotaan LRA tidak memiliki relasi yang kuat maupun dengan organisasi internasional yang terkait dengan penyelesaian pemberontakan ini.

Pada tahun 2005, *The International Criminal Court* menyebarkan berita untuk penangkapan pemimpin LRA, Joseph Kony dan 4 komandan utama yaitu, Vincent Otti, Okot Odhiambo, Dominic Ongwen dan Raska Lukiya akibat tindakan perang dan pelanggaran terhadap HAM. Pada tanggal 22 November 2011, Uni Afrika menyebut LRA sebagai grup teroris dan diperbolehkan tindakan untuk mengeliminasi LRA. Pada tahun berikutnya, Uni Afrika mulai mendesak PBB untuk meletakkan LRA sebagai grup teroris namun akibat tindakan pemberontakan LRA pada tahun tersebut dan seterusnya berkurang sampai sekarang LRA belum dimasukkan kedalam list grup teroris. Namun, Amerika Serikat sebagai salah satu anggota tetap DK-PBB menyebut LRA sebagai grup teroris semenjak tahun 2001.<sup>18</sup>

Terdapat faktor – faktor yang menyebabkan pemberontakan LRA tidak menemui jalur penyelesaian. Sebelum menuju jalur penyelesaian harus diketahui terlebih dahulu motif dari tindakan LRA sehingga kelompok ini mampu bertahan hingga sekarang. Dalam faktor internal, LRA dikenal sebagai kelompok radikal yang sering melakukan tindakan kekerasan dan pembunuhan di daerah terpencil di sekitar Uganda. Kenyataan bahwa mayoritas kekuatan LRA adalah hasil dari

---

<sup>18</sup>U.S Department of State, The Lord's Resistance Army, [m.state.gov/md186734.htm](http://m.state.gov/md186734.htm) diakses 30 Desember 2015

penculikan, maka LRA menggunakan sebuah mekanisme doktrinisasi melalui ketakutan guna membangun kesetiaan dalam internal kelompok. Tindakan kekerasan akan menimbulkan rasa ketakutan bagi anggota LRA apabila mereka keluar dari LRA maka mereka akan bernasib sama seperti warga di daerah terpencil tersebut. Sehingga rasa kesetiaan dalam sesama anggota kelompok LRA tinggi dan menemui kesulitan untuk masuk ke dalam internal LRA.

Dewan Keamanan PBB mulai melakukan pertemuan untuk mengatasi pemberontakan dimulai pada tahun 2006. Pada tahun ini dan berikutnya beberapa pertemuan dilakukan anggota dewan dengan Pemerintah Uganda dan negara korban lainnya. Pada tahun 2008, Dewan Keamanan PBB resmi masuk dan mulai melakukan misi – misinya untuk mengatasi pemberontakan setelah dikeluarkan resolusi 1812 pada tahun itu. PBB menetapkan Joaquim Chissano sebagai Utusan Spesial Sekjen PBB dalam mengatasi pemberontakan Uganda.<sup>19</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana keterlibatan Dewan Keamanan PBB dalam menjaga keamanan di Uganda dan sekitarnya akibat pemberontakan *Lord Resistance's Army* pada tahun 2008 -2014?

## **C. Kerangka Pemikiran**

Kerangka Pemikiran untuk Skripsi ini menggunakan teori peranan, teori resolusi konflik dan konsep organisasi internasional. Peranan (*role*) menurut

---

<sup>19</sup>Security Council Report: Update Report, 20 Maret 2007

Mohtar Mas'oe'd adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan seseorang yang menduduki suatu posisi. Teori ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah akibat tuntutan atau harapan terhadap peran yang kebetulan dipegang oleh seorang aktor politik. Dalam teori ini, institusi politik adalah serangkaian pola perilaku yang mengaitkan peran – peran agar saling berkesinambungan yang berfungsi untuk mengorganisasikan dan mengkoordinasikan perilaku demi mencapai suatu tujuan. Teori peran dan konsep organisasi internasional akan berkesinambungan dimana organisasi internasional akan melakukan tugasnya sesuai fungsi – fungsi yang diharapkan untuk melakukan tindakan tertentu.<sup>20</sup>

Pengertian organisasi internasional menurut Teuku May Rudy adalah pola kerjasama yang melintasi batas – batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan – tujuan yang diperlakukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun sesama kelompok non pemerintah pada negara berbeda.<sup>21</sup>

Terdapat dua macam organisasi internasional secara umum yaitu *Intergovernmental Organization* (IGO) dan *International Nongovernmental Organization* (INGO). IGO adalah organisasi internasional yang anggotanya adalah pemerintah atau instansi yang mewakili pemerintah suatu negara secara resmi. Kegiatannya diatur berlandaskan hukum publik. Sedangkan INGO adalah

---

<sup>20</sup>Mohtar Mas'oe'd, 1989, *Studi Hubungan Internasional:Tingkat Analisis danTeorisasi*, PAU-SS-UGM:Yogyakarta hal 45-46

<sup>21</sup>May Rudy, Teuku, 1993, *Administrasi Dan Organisasi Internasional*, PT Presco-IKAPI Hal 2-5

organisasi internasional yang berfokus di bidang olahraga, sosial, keagamaan, kebudayaan dan kesenian.<sup>22</sup>

Tujuan utama dari IGO yang menciptakan mekanisme untuk penduduk dunia untuk bekerja lebih sukses bersama-sama di bidang perdamaian dan keamanan, dan juga untuk menangani masalah ekonomi dan sosial. Dalam era saat ini dimana meningkatnya globalisasi dan saling ketergantungan dari negara, IGO memainkan peran yang sangat signifikan dalam sistem politik internasional dan pemerintahan global.<sup>23</sup> IGO biasanya didirikan oleh anggota didalamnya dengan tujuan bersama dari anggota. Misalnya, PBB disebut organisasi global karena semua negara diperbolehkan untuk menjadi anggota. IGO dibedakan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) dimana LSM dibentuk oleh dua atau lebih individu bukan oleh negara. Oleh karena itu LSM biasanya independen dari pemerintah, biasanya organisasi non-profit, dan menerima setidaknya sebagian dari dana mereka atau sumber-sumber swasta. IGO memiliki dukungan keuangan dan politik dari anggotanya.<sup>24</sup>

Peran dari IGO dilihat dari misi yang ingin disampaikan dari organisasi tersebut. Namun secara general, peran organisasi internasional adalah; 1) menciptakan kooperasi antar anggota, 2) membantu menghilangkan ancaman internasional dan 3) menjaga peraturan dan prinsip internasional.<sup>25</sup> Pertama, menciptakan kooperasi antar anggota dengan cara sosialisasi melalui pertemuan

---

<sup>22</sup>Ibid, 21

<sup>23</sup>Harvard Law, Intergovernmental Organizations (IGOs), <http://hls.harvard.edu/dept/opia/what-is-public-interest-law/public-international-law/intergovernmental-organizations-igos/> diakses 5 Oktober 2015

<sup>24</sup>Ibid, 23

<sup>25</sup>Mingst, Karen A., Arreguin Thoft, Ivan M., 2010, *Essentials of International Relations*, W. W. Norton & Company; Fifth Edition edition chapter 7

– pertemuan dalam organisasi tersebut. Dengan adanya pertemuan ini akan menimbulkan interaksi antar anggota, sehingga setiap anggota bisa mencapai kepentingan negaranya melalui pertemuan yang diselenggarakan oleh organisasi.

Kedua, membantu menghilangkan ancaman internasional. Peran IGO dalam masalah ancaman internasional ataupun dalam konflik yang berlangsung cukup signifikan dimana IGO bisa bertindak sebagai mediator atau penengah diantara dua pihak yang sedang berkonflik atau sebagai negosiator yaitu sebagai pihak kedua dimana pihak sebelumnya tidak mampu lagi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. IGO juga bisa bertindak sebagai penyusun perjanjian untuk organisasinya maupun untuk anggotanya. IGO juga berperan untuk mengirimkan pasukan khusus terutama militer ke daerah yang dianggap akan menjadi ancaman internasional apabila terus berlarut – larut terjadi. Ketiga, menjaga peraturan dan prinsip internasional. IGO sering menjadi ujung tombak penciptaan dan pemeliharaan aturan dan prinsip internasional. Jika IGO menggabungkan norma, aturan, dan proses pengambilan keputusan dari rezim maka IGO membantu meningkatkan nilai reputasi yang baik. Prinsip dan peraturan internasional dapat digunakan oleh kelompok-kelompok domestik untuk mendorong perubahan dalam kebijakan nasional.

Konflik yang telah terjadi di beberapa negara merupakan cerminan dari adanya gesekan akibat perbedaan pendapat antara aktor-aktor yang terlibat. Aktor-aktor ini dapat berupa negara dengan negara atau negara dengan beberapa kelompok yang menginginkan pemikirannya untuk didengar dan diprioritaskan.

**Weitzman & Weitzman berpendapat bahwa resolusi konflik sebagai sebuah**

tindakan pemecahan masalah bersama.<sup>26</sup> Resolusi konflik digunakan melalui cara yang lebih demokratis dan konstruktif dengan tujuan untuk menyelesaikan konflik dengan memberikan kesempatan pada pihak – pihak yang berkonflik untuk memecahkan masalah mereka oleh mereka sendiri atau dengan melibatkan pihak ketiga yang bijak, netral dan adil untuk membantu pihak yang berkonflik untuk memecahkan masalahnya. Menurut Johan Galtung adigatahapdalam penyelesaian konflik yaitu<sup>27</sup>:

1. Peacekeeping

Adalah proses menghentiknataumengurangiaksikekerasanmelaluiintervensimiliter yang menjalankanperansebagai penjagaperdamaian yang netral.

2. Peacemaking

Adalah proses yang tujuannyamempertemukanataumerekonsiliasisikappolitikdanstategidaripihak yang bertikamelaluimediati, negosiasi, arbitrasiterutamapada level elitataupimpinan. Dikaitkandengankasusini pihak – pihak yang bersengketa dipertemukangunamendapat penyelesaian dengancaradamai. Hal inidilakukandenganmenghadirkanpihakketigasebagai penengah, akantetapi pihak ketigatersebut tidak mempunyai hak untuk menentukan keputusan yang diambil. Pihak ketigatersebut hanyamenengahi apabilaterjadisuasana yang memanas antarapihak bertikai yang sedang berunding.

---

<sup>26</sup>Deutsch, Morton dan Coleman, Peter T. 2000. *The Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice*. San Fransisco: Jossey-Bass Publisher

<sup>27</sup>Hermawan, Yulius. 2007. *Transformasi dalam studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu, dan Metodologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 93

### 3. Peacebuilding

Adalah proses implementasi perubahan atau rekonstruksi sosial, politik, dan ekonomi demi terciptanya perdamaian yang langgeng. Melalui proses peacebuilding diharapkan *negative peace* (*the absence of violence*) berubah menjadi *positive peace* dimana masyarakat merasakan adanya keadilan social, kesejahteraan ekonomi dan keterwakilan politik yang efektif.

*Peacekeeping* adalah tindakan yang dilakukan melalui *Peacekeepers* dengan cara memberikan keamanan dan dukungan politik dan pembangunan perdamaian untuk membantu negara-negara yang mengalami transisi sulit awal dari konflik ke perdamaian. *Peacekeeping* memiliki kemampuan untuk menempatkan pasukan dan mempertahankan polisi atau pasukan dari seluruh negara yang terlibat dan mengintegrasikan mereka dan pasukan penjaga perdamaian sipil untuk memajukan mandat multidimensi. Pihak ketiga atau penengah disebut sebagai mediator memiliki artian sebagai perwakilan yang akan melakukan suatu proses mediasi. Mediasi menurut Gatot P. Soemartono adalah upaya [penyelesaian konflik](#) dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.<sup>28</sup> Berbeda dari proses negosiasi yang lain, mediator bebas untuk menentukan bagaimana proses penyelesaian sengketa berlangsung. Mediasi sering

---

<sup>28</sup> Gatot P. Soemartono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta

kali digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang sifatnya sensitif. Proses mediasi bersifat pribadi dan rahasia. Partisipan dari proses ini biasanya sukarela.

Peran yang dilakukan Mediator dalam proses negosiasi berupa mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati. Kedua, mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus atau pertemuan terpisah selama proses mediasi berlangsung. Dan mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.<sup>29</sup>

PBB didasarkan pada gagasan kesetaraan kedaulatan negara anggota. Setiap negara secara hukum setara dengan setiap negara bagian lainnya. Keputusan yang diambil dalam PBB tidak lepas dari adanya koorporasi antar negara – negara. Pengambilan keputusan tidak lepas dari kepentingan nasional negara anggotanya. Sebuah negara membutuhkan kehadiran IGO atau dalam hal ini PBB untuk menyelesaikan atau membantu konflik ataupun masalah dalam ekonom, politik dan lainnya. Ketika suatu negara meminta bantuan kepada organisasi internasional, maka negara tersebut memiliki obligasi untuk menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada organisasi internasional tersebut. Hal ini terjadi karena sebelum sebuah organisasi internasional bersedia membantu sebuah isu dalam negara, dilalui oleh beberapa sidang untuk menentukan bantuan seperti apa untuk negara tersebut. Ini merupakan masalah utama dalam hubungan

---

<sup>29</sup> Pengadilan Agama Labuan Bajo, Mediasi, Mediator <http://www.pa-labuanbajo.go.id/kepaniteraan-palbi/mediasi-palbi/tentang-mediiasi/149-mediiasi-mediator> diakses 5 November 2015

organisasi internasional dan negara anggota yaitu menentukan gerak batas organisasi internasional dalam suatu konflik<sup>30</sup>

PBB adalah organisasi internasional, melalui Dewan Keamanan PBB mereka dianggap mampu untuk membawa perdamaian dalam berbagai konflik di dunia internasional. Dalam konflik di Uganda dan sekitarnya yang melibatkan kelompok pemberontak yaitu LRA, PBB harus melakukan berbagai tindakan untuk menghindari perang akan terjadi dan terus menyebar ke berbagai negara bersamaan dengan PBB tidak boleh mengubah yurisdiksi negara-negara yang terkait dalam tindakan yang nantinya akan dilakukan PBB. Peran DK-PBB adalah menghilangkan masalah internasional seperti hak asasi manusia, telekomunikasi global dan regulasi lingkungan. LRA sudah dianggap masalah internasional karena sudah melanggar hak asasi manusia, dan telah mengganggu keamanan negara lain selain negara asal mereka yaitu Uganda.

#### **D. Hipotesis**

Peran Dewan Keamanan PBB untuk keterlibatannya dalam menjaga keamanan di Uganda dan sekitarnya akibat pemberontakan LRA pada tahun 2008 – 2014 adalah melakukan kebijakan untuk membatasi ruang gerak pemberontakan LRA dengan cara mengirimkan pasukan perdamaian untuk penyelamatan warga sipil dari tindakan kekerasan LRA dan berpartisipasi dalam mediasi untuk proses negosiasi menuju perdamaian.

---

<sup>30</sup>Ibid, 26

## **E. Tujuan Penelitian**

Dalam sebuah penelitian ilmiah senantiasa terdapat tujuan penelitian. Oleh karena itu ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini diantaranya:

1. Penulisan ini bertujuan mengetahui bagaimana pemberontakan yang dilakukan oleh *Lord's Resistance Army* di Uganda sehingga menarik perhatian organisasi internasional
2. Penulisan ini bertujuan mengetahui tindakan apa yang sudah dilakukan oleh organisasi internasional (PBB dan Uni Afrika) dalam penyelesaian konflik di Uganda dan sekitarnya.
3. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi kesarjanaan (strata 1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## **F. Metode Penelitian**

Terdapat perbedaan mendasar terkait metode penelitian kuantitatif dan kualitatif seperti yang dijelaskan James Mahoney dan Gary Goertz.<sup>31</sup> Penelitian kuantitatif merujuk analisisnya berdasarkan pada basis angka. Hal ini bisa didefinisikan sebagai semua informasi atau data diwujudkan dalam bentuk kuantitatif / angka – angka yang analisisnya berdasar pada angka. Hal sebaliknya pada penelitian kualitatif. Kualitatif merujuk pada klarifikasi antara ilmu sosial yang cenderung dekat pada kualitatif, dengan ilmu alam yang lekat pada pendekatan kuantitatif.

---

<sup>31</sup>James Mahoney dan Gary Goertz, 2006, *A Tale of Two Cultures ; Constrating Quantitative and Qualitative Research*, Hal 1-3

Skripsi yang dikerjakan penulis merujuk pada penelitian dalam ilmu sosial, sehingga penulis memilih menggunakan metode penelitian kualitatif. Detail yang akan dijelaskan paparan dalam skripsi dibangun melalui data sekunder. Pemakaian studi literatur, yang mengutamakan data tertulis dalam bentuk cetak seperti buku, jurnal, makalah, koran dan diktat kuliah. Serta juga berusaha melengkapinya dengan data tertulis bentuk elektronik seperti e-book, e-jurnal, website dan news.

### **G. Jangkauan Penelitian**

Dalam suatu tulisan ilmiah diperlukan pembatasan masalah guna menghindari terjadinya disintegrasi dan berimplikasi pada ruang lingkup jika pembahasan tidak dibatasi. Oleh karena itu dalam setiap penulisan ilmiah selalu dibutuhkan pembatasan masalah atau dengan menggunakan jangkauan penelitian.

Secara spesifik, skripsi yang dibuat penulis fokus pada kejadian faktual dari berbagai kebijakan yang dilakukan Dewan Keamanan PBB dalam upaya mengatasi pemberontakan *Lord's Resistance Army* (LRA) di Uganda dalam periode tahun 2008 – 2014.

### **H. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini berisi pemaparan yang dirinci dalam 5 bab dengan masing – masing bab terdiri dari sub-bab.

BAB I adalah pendahuluan berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, metode penelitian, jangkauan penelitian, sistematika penulisan.

BAB II gambaran Dewan Keamanan PBB berisikan profil PBB, Dewan Keamanan PBB secara menyeluruh dan perhatian PBB terhadap keamanan dunia dan apa yang sudah dilakukan dalam mengatasi konflik internasional.

BAB III, gambaran instabilitas politik di Uganda. Pada bagian pertama menjelaskan sejarah pemberontakan LRA di Uganda dan sekitarnya. Bagian kedua akan mengulas usaha pemerintah Uganda dan Uni Afrika dalam mengatasi pemberontakan LRA di Uganda dan sekitarnya. Bagian terakhir adalah awal mula masuknya peran PBB dan DK-PBB dalam mengatasi pemberontakan LRA di Uganda pada tahun 2006 – 2008.

BAB IV membahas tentang peran - peran yang dilakukan DK-PBB dalam mengatasi pemberontakan LRA. Bagian pertama adalah pengiriman pasukan perdamaian yang dilakukan DK-PBB melalui MONUSCO, penambahan mandat UNMISS dan kerjasama dengan UPDF. Bagian kedua adalah peranan DK-PBB sebagai mediator dalam mengatasi pemberontakan LRA melalui UNOCA.

BAB V PENUTUP berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang dipaparkan dalam skripsi ini